

DAFTAR PUSTAKA

Didik Sukriono, “Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia”, artikel pada
 Jurnal Konstitusi, terdapat dalam
https://didiksukriono.files.wordpress.com/2012/01/jurnal_konstitusi_volume-i-nomor-1-september-2019.pdf

Henny Indarriyanti dkk, Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model *Lotre* sebagai
 Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa, *Jurnal prosiding Seminar
 Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (Snaper-Ebis 2017) –
 Jember, 27-28 Oktober 2017*

Wisnu Susanto, Masalah Tanah Bengkok Dan Tanah Gogolan, Jurnal Yuridika No.
 4-5 Tahun VI, JuliAgust-Sept-Okt, Surabaya

Soerjono Soekanto, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa.
 (Jakarta: Ghalia Indonesia1993)

Maurer, Jeane-luc, Pamong Desa or Raja Desa? Wealt.status and power of village
 officers in Antlov, H.and cedderroth.s(ed) leadership in java: gentle hints,
 authoritarianrule routledge & curzon pp, 1994)

Henny Indarriyanti, Dkk, Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model Lotre Sebagai
 Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa, Jurnal Jember, 27-28 Oktober 2017

Sigit Sapto Nugroho, “Eksistensi Tanah Bengkok/Ganjaran Sebagai Aset Desa

Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Ngujung, Maospati, Magetan, Jawa Timur)”, diakses dari http://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%20Yustisia%20Merdeka/2015/maret/SIGIT%20APTO%20NUGROHO.pdf

Pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015

Pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007

Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Liberty, 2011

Bumdes, *Mekanisme Penggunaan Tanah Kas Desa*”.
<http://bumdes.id/blog/2017/10/24/>

Nunung Runiawati. *Pemanfaatan Barang Milik Daerah (suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam Menentukan Metode Pemanfaatan Aset)*.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983),

R. Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung : Alumni, 2010),

N. Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011),

<http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004),

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, cet.2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012),

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet:1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 248.

Moh Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58f96417b7ee2/status-hukumtanah-bengkok-sebagai-kekayaan-desa>

Akhmad Zakky Rusdianto, Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkulu (Studi kasus di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015.

- Any Safitri, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2020.
- Fanja Saputri, Hukum Sewa Menyewa Tanah Bengkok Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Purwodadi Kecamatan Kotagajah), Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2020.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bima Ilmu, 2004),
- Sugiyono. Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D,
- Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. (Jakarta: Kencana. 2012)
- Afrizal, Metode penelitian: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dan berbagai disiplin Ilmu. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016)
- Wawancara bapak Abdul Kadir selaku Kepala Desa Bayeman, tanggal 27 Juni 2023
- Wawancara Ibu Ninik selaku Kaur Pelayanan, tanggal 27 Juni 2023
- Widjaja, Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Bayu Suryaningrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Jakarta: Aksara Baru, 1995
- Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013